

**KEPENTINGAN EKONOMI – POLITIK PAPUA NUGINI DALAM
MENERIMA KEBIJAKAN PAPUA NEW GUINEA SOLUTION
(PNG SOLUTION) DENGAN AUSTRALIA UNTUK MENGATASI
PENCARI SUAKA**

Oleh : Eka Susanti

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : eka.susanti.2012@fisipol.umy.ac.id/susantiriyadi@gmail.com

Abstract:

This paper is analyzing the political economic interest of Papua New Guinea in receiving PNG Solution in collaboration with Australia to overcome the asylum seeker. This paper explains the reason why Papua New Guinea is willing to be a shelter for the Australia asylum seekers. Based on the fact, Papua New Guinea wants to cooperate with Australia regarding the asylum seekers because Papua New Guinea received help from Australia in several sectors which becomes national interest in Alotau Accord 2012. In addition, this topic also use rational actor model to explain this paper.

Keyword: rational actor model, asylum seeker, PNG Solution, Alotau Accord 2012, Regional Resettlement Arrangement

PENDAHULUAN

Hubungan Papua Nugini dengan Australia sudah terjalin selama Perang Dunia I, ketika wilayah ini diduduki oleh Australia yang telah diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Hubungan dekat Papua Nugini dengan Australia sudah dipertahankan sejak kemerdekaan damai dan Australia adalah negara dengan bantuan donor terbesar bagi Papua Nugini, yaitu lebih dari 50% bantuan luar negeri Papua Nugini berasal dari Australia.

PROBLEM IMIGRAN BAGI PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PAPUA NUGINI

Meningkatnya jumlah kedatangan pencari suaka ke Australia menyebabkan Pemerintah Australia mulai membatasi diri untuk memberikan

status pengungsi dan visa perlindungan kepada para pencari suaka tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh Pemerintah Australia dalam mengurangi jumlah kedatangan pencari suaka yang salah satunya dengan menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara di sekitar wilayahnya. Papua Nugini merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan Australia terkait pencari suaka yang datang ke Australia melalui jalur laut atau yang disebut sebagai *boat people*. Kerjasama bilateral yang dimaksud yaitu *Regional Resettlement Arrangement (RRA) – Papua New Guinea Solution (PNG Solution)*. Bentuk kerjasama ini yaitu para pencari suaka yang tiba di Australia kemudian dibawa ke wilayah Papua Nugini untuk dilakukan pemindahan dan pemrosesan di bawah hukum Papua Nugini.

Ketika Papua Nugini dihadapkan pada rencana Kebijakan *Regional Resettlement Arrangement (RRA) – PNG Solution* oleh Australia, Papua Nugini mempunyai dua alternatif tindakan yang dapat diambil yaitu menerima dan melaksanakan bentuk Kebijakan PNG Solution atau menolak kebijakan tersebut. Kedua alternatif tindakan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dan dihadapkan pula pada keterbatasan-keterbatasan yang ada ketika keputusan tersebut akan dibuat. Namun pada akhirnya, Papua Nugini memilih alternatif pertama yakni menerima dan melaksanakan bentuk Kebijakan *PNG Solution* yang menjadi jawaban terhadap kebijakan luar negeri negaranya. Sebagai negara yang rasional, maka Papua Nugini akan menilai alternatif ini dengan mempertimbangkan tujuan negara, konsekuensi yang akan didapat, serta kendala yang akan timbul sebagai akibat memilih alternatif tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan Model Aktor Rasional milik Graham T. Allison, maka alternatif tindakan yang dipilih oleh Papua Nugini akan dijelaskan sesuai dengan konteks pengambilan keputusan yang dibuat pada saat itu.

ALTERNATIF PILIHAN DENGAN MENOLAK KEBIJAKAN PNG SOLUTION

Keuntungan Papua Nugini Menolak Kebijakan PNG Solution

Konsekuensi positif Papua Nugini jika menolak Kebijakan *PNG Solution* yaitu tekanan yang di dapat oleh Papua Nugini dari banyak pihak yang menjadi kendala Papua Nugini tidak akan terjadi. Tekanan-tekanan tersebut berasal dari berbagai pihak yang kontra terhadap isi dari kebijakan *PNG Solution*. Selain itu, konsekuensi positif lain dari penolakan Papua Nugini terhadap Kebijakan *PNG Solution* adalah Papua Nugini tidak perlu merasa khawatir terhadap citra negara di mata internasional.

Kerugian Papua Nugini Menolak Kebijakan PNG Solution

Kerugian yang didapat Papua Nugini jika menolak Kebijakan *PNG Solution* yang ditawarkan oleh Australia ialah tujuan utama dari Papua Nugini yakni menjalin hubungan kembali dengan Australia yang awalnya sempat terputus tidak dapat tercapai. Kemudian, bantuan luar negeri Australia yang sangat dibutuhkan oleh Papua Nugini juga tidak akan didapat. Bantuan-bantuan tersebut antara lain berasal dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi berkelanjutan, dan sebagainya.

ALTERNATIF PILIHAN DENGAN MENERIMA DANMELAKSANAKAN KEBIJAKAN PNG SOLUTION

Keuntungan Papua Nugini Menerima dan Melaksanakan Kebijakan PNG Solution

Terdapat dua keuntungan yang didapat Papua Nugini dengan menerima dan melaksanakan Kebijakan *PNG Solution*. Keuntungan pertama adalah tujuan utama Negara Papua Nugini yakni menjalin hubungan kembali dengan Australia dapat tercapai. Keuntungan kedua yaitu Papua Nugini mendapat bantuan dari berbagai sektor seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan yang menjadi tujuan Pemerintah Papua Nugini. Poin-poin keuntungan tersebut menjadi faktor yang menyebabkan Papua Nugini bersedia menjadi tempat penampungan bagi para pencari suaka tujuan Australia melalui

kerjasama Kebijakan *PNG Solution* yang telah disetujui oleh PM Kevin Rudd dari Australia dan PM Peter O'Neill dari Papua Nugini.

Dalam kerjasama Kebijakan *PNG Solution* ini, terdapat empat bidang yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Australia dan Pemerintah Papua Nugini, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi berkelanjutan. Empat bidang inilah yang menjadi fokus Pemerintah Australia dalam memberikan program bantuan kepada Pemerintah Papua Nugini. Berikut akan dijabarkan program bantuan yang diberikan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Papua Nugini dalam empat bidang tersebut:

i. Program Bantuan Pemerintah Australia dalam Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, bantuan Australia meliputi kontribusi dalam pengelolaan dana subsidi, subsidi uang sekolah, program pelatihan bagi guru, peningkatan akses dan standarisasi kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan memberikan beasiswa Australia Awards. Dalam sektor ini, Australia memberikan donor terbesar dengan menyediakan AUD 100 juta (DFAT, 2010). *PNG-Australia Partnership for Development* memberikan kontribusi untuk kemajuan dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di semua tingkat di tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, Pemerintah Australia memberikan kontribusi subsidi untuk 4.159 sekolah dasar dengan lebih dari 600.000 siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan secara nasional pada jumlah pendaftaran siswa Sekolah Dasar di Papua Nugini yang mencapai 79% dalam kurun waktu 2013-2014. Kebijakan Pemerintah Papua Nugini dengan meningkatkan pangsa subsidi untuk sekolah, memberikan kesempatan bagi Australia dalam berkonsentrasi memberikan kontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi distribusi subsidi. Dengan dukungan Australia ini, akurasi, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran terus membaik.

Peningkatan pendaftaran siswa di sekolah-sekolah menghasilkan permintaan untuk sumber daya tambahan sekolah. Menyikapi hal ini, Pemerintah

Australia memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur sekolah, dengan menyediakan 88 ruang kelas, 44 rumah guru dan 44 blok wudhu di tahun 2013. Tambahan 178 ruang kelas, 89 rumah guru dan 89 blok wudhu yang sedang berada di bawah konstruksi (DFAT, 2014).

Selain itu, program pelatihan kurikulum dan guru telah menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Nugini. Masih menjadi kelemahan utama dalam reformasi pendidikan di Papua Nugini, kedua pemerintah terus mengejar peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di universitas di Papua Nugini. Cara-cara yang ditempuh antara lain, melakukan dialog kebijakan antara *The PNG Office of Higher Education* (OHE) dan DFAT telah efektif, enam universitas telah menyelesaikan penilaian untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang akan meningkatkan kualitas tata kelola universitas, program akademik dan penelitian. Pemerintah Australia juga akan memberikan bantuan tambahan untuk mengimplementasikan temuan dari penilaian, di bawah Kesepahaman Bersama (JU). Papua Nugini dan Australia juga telah sepakat untuk bekerjasama dalam kegiatan prioritas infrastruktur pendukung.

Pemerintah Australia juga berkontribusi dalam memberikan beasiswa Australia Awards. Beasiswa ini bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Papua Nugini melalui pengembangan pria dan wanita yang mampu menerapkan keahlian dan pengalaman untuk berperan aktif dalam dunia kerja dan lingkungannya. Pada tahun 2013, program yang disediakan yaitu beasiswa studi pascasarjana ke Australia untuk 154 orang Papua Nugini. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para sarjana di Australia untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Dari 258 alumni yang disurvei pada tahun 2013 (beasiswa 2006-2010), hampir semua ditemukan sedang bekerja atau belajar. Selain itu, program ini juga bertujuan memberikan kontribusi untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi di Papua Nugini dan terus memberikan 15% dari beasiswa kepada akademisi di sektor pendidikan tinggi di Papua Nugini. Australia Awards juga disediakan untuk 450 perawat, bidan, dan para pekerja

kesehatan masyarakat di Papua Nugini. Hal ini sebagai upaya khusus menanggapi kesenjangan tenaga kerja kesehatan di pedesaan.

ii. Program Bantuan Pemerintah Australia dalam Bidang Kesehatan

Bantuan yang diberikan Pemerintah Australia dalam bidang kesehatan antara lain penanganan terhadap HIV/AIDS, ketersediaan alat-alat medis, pembangunan sarana kesehatan, dan bidang keluarga berencana dan kesehatan anak seperti imunisasi anak. Pada tahun 2013-2014 Pemerintah Australia menginvestasikan sekitar USD 99 juta untuk pelayanan kesehatan dan penanganan HIV/AIDS di Papua Nugini. Hal ini dilakukan melalui lima inisiatif yaitu pembiayaan, pengadaan, pengembangan kapasitas dan pelayanan, serta kemitraan multilateral dan beasiswa di dalam negeri. Di Papua Nugini sendiri terdapat sekitar 30.000 orang hidup dengan virus HIV, dengan prevalensi sekitar 0,6% pada orang dewasa dalam rentang umur 15-49 tahun. Mayoritas penyebaran virus tersebut melalui kontak seksual dan hanya kurang dari 5% melalui penularan dari ibu ke anak (UNICEF, 2013). Australia juga berkontribusi dalam mengimunisasi 54.393 dari 209.202 anak-anak yang terkena campak, meskipun lebih dari 91.000 anak-anak yang masih membutuhkan vaksin tersebut (DFAT, 2014). Selain itu, Pemerintah Australia juga memfasilitasi tes HIV untuk lebih dari 12.000 orang termasuk di antaranya 40.255 wanita hamil dan melakukan terapi anti-retroviral untuk 4.350 orang yang dinyatakan positif HIV. Kontribusi untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dilakukan dengan mendistribusikan obat-obatan di semua pusat kesehatan dan juga lebih dari 1,4 juta kelambu dibagikan di seluruh daerah di Papua Nugini.

Tidak hanya itu, Pemerintah Australia membantu dalam pembiayaan sektor kesehatan Papua Nugini. Hal ini terbukti pada tahun 2013 misi bantuan teknis Australia membantu dalam mengamankan pendanaan pelayanan kesehatan di Papua Nugini dan berhasil mengamankan pendanaan AUD 5,14 juta untuk *Christian Health Services* di anggaran Papua Nugini tahun 2014. Selain itu, pendistribusian obat-obatan yang dilakukan Australia memberikan dorongan

penting bagi terbatasnya cakupan Pemerintah Papua Nugini dalam pendistribusian obat-obatan ke daerah-daerah paling terpencil. Ketersediaan keseluruhan obat di Papua Nugini meningkat 64% pada tahun 2013 (DFAT, 2014).

Bantuan kesehatan yang diberikan Pemerintah Australia juga meliputi pembangunan sarana kesehatan. Dana insentif Australia yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan di tahun 2013-2014, berhasil menyelesaikan empat proyek pembaharuan rumah sakit, pembaharuan fasilitas kesehatan dan perumahan staf di tiga provinsi di Papua Nugini. Pemerintah Australia berkomitmen untuk membangun kembali Rumah Sakit ANGAU dengan mendanai sebesar AUD 207 juta. Australia juga mendanai pembangunan Daru General Hospital TB, membangun rumah sakit baru di Mt. Hagen, Goroka, Lorengau, Buka dan Daru (DFAT, 2014). Selain itu, Pemerintah Australia berkomitmen untuk menyediakan 100% peralatan medis dan mendistribusikannya ke Rumah Sakit Lorengau dan pusat-pusat kesehatan di Provinsi Manus, Papua Nugini.

Tenaga kerja kesehatan di Papua Nugini juga menjadi prioritas dalam program bantuan Pemerintah Australia. Terdapat hampir 400 tenaga kesehatan baru terdaftar dalam program kesehatan masyarakat, keperawatan dan kebidanan di tahun 2013. Pemerintah Australia juga melakukan pendanaan terhadap delapan fasilitator kebidanan klinis atau *clinical midwifery facilitators* (CMF) di keempat sekolah kebidanaan, terus meningkatkan pengajaran dan kualitas pembelajaran bagi tenaga kerja kesehatan di Papua Nugini. Hal ini terbukti 93% dari mahasiswa kebidanan lulus pada tahun 2013 (DFAT, 2014). Bantuan Pemerintah Australia terhadap pelayanan kesehatan di Papua Nugini berdampak pada peningkatan grafik usia harapan hidup masyarakat Papua Nugini yang semula 60 tahun menjadi 65 tahun. Selain itu, persentase tingkat imunisasi bagi anak usia 1-2 tahun juga meningkat dari 50% menjadi 70% anak yang telah melakukan imunisasi.

iii. Program Bantuan Australia dalam Bidang Infrastuktur

Program bantuan Australia dalam bidang infrastruktur mencakup pembangunan jalan raya dan jembatan, pembangunan akomodasi, perbaikan kantor polisi, peningkatan fasilitas komunikasi, pembuatan *transit centre* untuk para pencari suaka di Papua Nugini dan pembangunan sekolah serta rumah sakit. Pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi guna memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi di Papua Nugini, memfasilitasi Papua Nugini dalam menangani *transfer of asylum seeker* dari Australia serta meningkatkan kualitas negara Papua Nugini sehingga akan berdampak pada bidang-bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan dan ekonominya.

Pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Australia yaitu renovasi pasar di daerah Lorengau yang merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat daerah tersebut. Renovasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Australia seperti perluasan tempat sehingga mampu untuk memberikan ruang yang lebih luas untuk berjualan bagi masyarakat desa tersebut yang semula berjumlah 480 kios kini menjadi 740 kios dan 8 toko kecil, pembangunan toilet khusus perempuan dan perbaikan terhadap toilet perempuan dan laki-laki yang semula sudah ada, pembangunan pos keamanan, pembangunan taman bermain untuk anak-anak, dan pengaturan tanaman. Pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Provinsi Manus itu sendiri.

Program bantuan Pemerintah Australia untuk infrastruktur transportasi berfokus pada: pemeliharaan dan rehabilitasi jalan prioritas nasional Papua Nugini, yang meliputi, peningkatan penerbangan dan standar keselamatan dan keamanan maritim, dan reformasi operasional lembaga sektor transportasi. Bantuan Pemerintah Australia untuk sektor ini disampaikan melalui program terpadu yang mencakup Program Bantuan Sektor Transportasi (TSSP), yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Australia melalui Program Strongim Gavman (SGP) dan Papua Nugini / Australia Transportasi Memorandum of

Understanding (MoU). Pengeluaran TSSP untuk 2013 adalah sekitar AUD 75 juta.

Sekitar 73% dari pengeluaran bantuan Pemerintah Australia di sektor ini diarahkan pada prioritas perbaikan jalanan nasional Papua Nugini. Investasi ini terutama didukung kegiatan pemeliharaan pada sekitar 50% dari prioritas perbaikan jalanan nasional di 12 provinsi – yang setara dengan 2,705 km jalan yang memiliki akses penting terhadap kegiatan ekonomi di Papua Nugini. Pada tahun 2013-2014, Pemerintah Australia juga telah berhasil melakukan perbaikan jalan raya di Papua Nugini hingga mencapai 9.000 km sejak dilakukan pada tahun 2010. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 2014 Pemerintah Australia juga berkomitmen akan melanjutkan lagi pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan yang bekerjasama dengan *Department of Works* Papua Nugini dan Kantor Administrasi Provinsi Manus. Pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan tersebut dibagi menjadi tiga proyek meliputi proyek Momote – Lorengau Road, proyek Lorengau Market Square Road dan drainase di wilayah tersebut, serta proyek perbaikan Jembatan Loniu dan Jembatan Nuwok.

iv. Program Bantuan Australia dalam Bidang Ekonomi Berkelanjutan

Papua Nugini telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat selama lebih dari satu dekade, didorong oleh pertambangan dan ekspor pertanian yang menjadi sektor menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi negara Papua Nugini. Namun, pertumbuhan yang kuat ini belum mampu menghasilkan pemerataan pembangunan dan menjawab berbagai tantangan di Papua Nugini. Lebih dari 40% dari populasi masyarakat Papua Nugini masih tergolong miskin dan menghadapi kesulitan, dan 80% hingga 85% dari masyarakat Papua Nugini tinggal di pedesaan (DFAT, 2014).

Meskipun banyak tantangan dalam pembangunan ini, Pemerintah Papua Nugini telah menetapkan prioritas dalam ‘Alotau Accord’ 2012 dan mencakup pendidikan, kesehatan, hukum dan keadilan, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam agenda pertumbuhan ekonomi,

Pemerintah memfokuskan pada: investasi di infrastruktur yang memiliki dampak penting bagi pertumbuhan ekonomi Papua Nugini, seperti jalan utama, pelabuhan, listrik dan rumah sakit. Kemudian, meningkatkan keterampilan para pekerja di Papua Nugini – termasuk membantu partisipasi angkatan kerja muda yang lebih besar. Serta bermitra dengan sektor swasta – termasuk mendukung peran pihak swasta dalam memberikan layanan yang nantinya akan meningkatkan efektivitas bagi pertumbuhan ekonomi Papua Nugini. Pemerintah Australia mendukung penuh agenda pembangunan ambisius dari Pemerintah Papua Nugini. Program bantuan Pemerintah Australia ini mencoba untuk mensejajarkan dengan tujuan politik dan ekonomi dari Pemerintah Papua Nugini itu sendiri.

Program bantuan Pemerintah Australia dalam sektor ekonomi berkelanjutan yaitu meningkatkan dukungan untuk investasi sektor swasta yang mengurangi biaya dalam melakukan bisnis, mengurangi resiko dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, Pemerintah Australia mendukung perbaikan dalam bisnis infrastruktur transportasi seperti perbaikan pelabuhan, jembatan, dan jalan raya yang menghubungkan desa ke kota sehingga mempermudah akses bagi masyarakat yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi negara Papua Nugini itu sendiri, lingkungan yang mendukung, pertanian dan pembangunan pedesaan, inovasi dan bisnis kemitraan, dan inklusi keuangan. Semua investasi ini memiliki fokus yang kuat terhadap peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara Papua Nugini, terutama daerah pedesaan. Prioritas Pemerintah Australia untuk memastikan program bantuan ini memberikan bantuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Papua Nugini.

Pada realita yang ada bahwa infrastruktur yang tidak memadai dan kurang terpelihara akan menciptakan rintangan yang signifikan untuk melakukan bisnis dan membatasi pertumbuhan ekonomi yang akan dijalankan. Oleh karena itu, investasi bantuan Australia dalam infrastruktur diperkirakan akan meningkat dari 37% menjadi sekitar 50% pada 2017. Investasi ini mendukung pembangunan dan kegiatan pemeliharaan untuk skala investasi infrastruktur yang lebih besar untuk

Papua Nugini. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan pemerintah untuk karyawan terampil, Pemerintah Australia meningkatkan investasi bantuan dalam pelatihan keterampilan pemuda dan penempatan kerja, pendidikan teknis, kejuruan dan pelatihan, dan pendidikan tinggi.

Selain itu, sektor swasta juga menjadi fokus utama dari Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Australia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua Nugini. *Private Sector Development Framework* mengidentifikasi berbagai investasi untuk membantu mengurangi biaya dalam melakukan bisnis, mengurangi risiko dan meningkatkan produktivitas di bawah empat pilar yaitu: *improvements in the business enabling environment*, pertanian (pembangunan pedesaan, pasar, dan perdagangan), inovasi dan bisnis kemitraan, dan inklusi keuangan (DFAT).

Berikut penjelasan empat pilar keterlibatan sektor swasta Australia di Papua Nugini:

1. Business Enabling Environment

Dalam sektor ini, dukungan Australia akan fokus pada penguatan kapasitas pemerintah Papua Nugini, termasuk mendukung agenda reformasi. Program yang akan diusung pertama ialah *International Finance Corporation* (IFC), IFC mendukung penciptaan pendaftaran bisnis online di Papua Nugini yang nantinya mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar bisnis dan memulai *trading*. Registrasi ini melayani lebih dari 100.000 entitas dan memungkinkan untuk melakukan pendaftaran online, pemeliharaan rincian dan memberikan *online public searching* secara cuma-cuma. Selain itu, IFC juga telah mendukung pembentukan dan pertumbuhan PNG *Micro Finance Limited* (MFL) melalui ekuitas dan bantuan teknis selama 4 tahun. MFL memberikan tabungan, kredit, dan asuransi untuk 55.000 rumah tangga (Australian High Commission, 2015). MFL juga menyediakan pembiayaan untuk transportasi, sektor pertanian dan UKM yang semuanya sangat penting dan dibutuhkan dalam bekerja.

Program kedua pada sektor ini ialah *Private Sector Development Initiative* (PSDI). *Asian Development Bank* (ADB) telah mengidentifikasi bahwa perempuan sangat dirugikan dalam sektor swasta. Fokus utama dari PSDI yaitu mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan. Pada tahun 2013, PSDI memulai program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (EEOW), program ini menjadi percontohan program-program yang mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor swasta. Salah satu proyek yang baru-baru ini dicanangkan ialah ‘*Woman in fishing production by strengthening the supply chain*’. Tujuan dari proyek ini untuk membantu perempuan di dua desa nelayan kecil di Papua Nugini untuk memperoleh keterampilan kewirausahaan dan dapat membawa produk mereka ke pasar.

2. Agriculture (rural development, markets, and trade)

Lebih dari 85% penduduk Papua Nugini tinggal di pedesaan dan pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di Papua Nugini – namun hanya sekitar 3% tanah dibudidayakan untuk tanaman ekspor (Australian High Commission, 2015). Sektor pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian domestik dan ekspor pertanian yang nantinya akan bermanfaat bagi penduduk miskin pedesaan di Papua Nugini.

Transformative Agriculture and Enterprise Development (TADEP) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi untuk masyarakat pedesaan di tujuh provinsi di Papua Nugini, dengan penekanan yang ditujukan pada petani wanita, promosi keterampilan bisnis dan pelatihan serta pengembangan pasar. Sektor ini akan berfokus pada penanaman tanaman seperti ubi jalar, kakao dan industri kacang canarium.

Tabel 1. Volume Ekspor Komoditas Utama Papua Nugini (dalam ton)

(’000 tonnes, unless otherwise specified)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Actual	Est	Proj	Proj	Proj	Proj	Proj
AGRICULTURE							
Copra	32.9	15.1	15.2	18.9	21.8	21.8	21.8
Cocoa	38.1	29.5	30.4	31.3	32.3	40.0	47.9
Coffee	55.5	42.0	43.5	46.5	48.0	52.8	58.1
Palm Oil	483.0	440.2	492.0	536.7	561.2	578.5	594.9
Rubber	5.1	5.3	5.6	5.9	6.3	6.6	7.0
Tea	3.8	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Copra Oil	22.0	14.6	16.2	35.0	35.0	35.0	35.0
Logs	3148.0	3022.0	3022.0	3022.0	3022.0	3022.0	3022.0
Marine products	71.1	73.2	75.4	77.7	80.0	82.4	84.9
MINERAL							
Gold (tonnes)	46.8	52.9	53.4	56.8	57.9	64.6	64.8
Copper (tonnes)	125.3	129.2	108.1	105.7	82.0	76.8	76.8
Oil (million barrels)	8.9	5.8	5.1	4.4	3.8	3.2	3.2
LNG (Tbtu)			63.2	356.1	356.5	356.5	356.5
Condensate (MB)			2.7	11.2	11.3	11.1	11.1
Nickel (tonnes)	200	15866	25386	31732	31732	31732	31732
Cobalt (tonnes)	19.0	1428.0	2284.7	2855.9	2855.9	2855.9	2855.9

Source: Actuals from BPNG. Projections from Dept. of Treasury.

Sumber: <http://www.jica.go.jp>– *Investment Guide Papua New Guinea*

Pada tabel 1. menunjukkan bahwa copra atau daging buah kelapa yang dikeringkan, kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan teh merupakan tanaman yang menjadi komoditas ekspor utama di Papua Nugini. Pada tahun 2012, Pemerintah Papua Nugini berhasil mengekspor 32,9 copra dan 38,1 kopi. Pada tahun 2013, sebesar 15,1 ton copra berhasil di ekspor ke berbagai negara, jumlah ini kemudian diproyeksikan menjadi sebesar 15,2 ton di tahun 2014, dan pada tahun 2015 naik sebesar 18,9 ton. Tidak hanya copra, tanaman komoditas ekspor utama lain seperti kakao dan kopi pada tahun 2014 diproyeksikan akan diekspor sebesar 30,4 ton dan 34,5 ton pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 31,3 ton dan 46,5 ton.

Selain itu hasil mineral atau tambang juga menjadi komoditas utama di Papua Nugini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pada tabel 1. menunjukkan volume ekspor emas, tembaga dan minyak mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, ekspor emas Papua Nugini sebesar 46,8 ton dan tembaga sebesar 125,3 ton. Pada tahun 2013, ekspor emas berada di 52,9 ton dan diproyeksikan meningkat sebesar 53,4 ton pada tahun 2014. Jumlah ini kemudian naik menjadi 56,8 ton pada tahun 2015. Tembaga juga diproyeksikan naik sebesar

129,2 ton pada tahun 2013, 108,1 ton pada tahun 2014. Kemudian, volume ekspor minyak Papua Nugini pada tahun 2012 sebesar 8,9 juta perbarell dan pada tahun 2013 sebesar 5,8 juta perbarell. Kemudian pada tahun 2014 ekspor minyak Papua Nugini diproyeksikan sebesar 5,1 juta perbarell. Selain itu, Papua Nugini juga melakukan ekspor mineral seperti nikel, kobalt, dan gas.

Program kedua yaitu program *Pacific Horticultural and Agricultural Market Access* (PHAMA). PHAMA akan bekerja untuk mengatasi kapasitas rendah di sektor swasta dan publik untuk mengembangkan pasar internasional. Kegiatan yang akan dieksplorasi meliputi (Australian High Commission, 2015):

1. Membantu rencana mengembangkan sektor komoditas untuk kebutuhan pembangunan dan ekspor.
2. Membantu kemajuan berkelanjutan untuk kakao dan standar kualitas kopi.
3. Memulai bekerja pada artefak dan kerajinan tangan.
4. Memberikan bantuan kepada beberapa perusahaan untuk lebih mengembangkan produk rempah-rempah dan coklat untuk ekspor.

Tabel 2. Grafik Kegiatan Ekspor Papua Nugini dari Tahun 2013-2015 (dalam PGK)



Sumber: www.tradingeconomics.com, data bersumber dari Bank of Papua New Guinea

Tabel 3. Grafik Kegiatan Impor Papua Nugini dari Tahun 2013-2015 (dalam PGK)



sumber: www.tradingeconomics.com, data bersumber dari Bank of Papua New Guinea

Pada tabel 2. menunjukkan nilai ekspor yang dilakukan oleh Papua Nugini bersifat fluktuatif. Hal ini terlihat pada Januari 2013 hingga Januari 2014 yang mengalami penurunan dari PGK 3.676 Juta pada kuartal kedua Januari 2013, kemudian pada Januari 2014 kuartal ketiga menjadi PGK 3.292 juta. Selanjutnya, tabel menunjukkan kenaikan ekspor pada kuartal ketiga Juli 2014 sebesar PGK 7.021 juta, tetapi nilai ekspor menurun menjadi PGK 5.189 juta pada Juli 2015.

Kemudian, pada tabel 3. menunjukkan nilai impor yang dilakukan oleh Papua Nugini menurun menjadi PGK 998 juta pada kuartal ketiga tahun 2015 dari PGK 1.672 juta pada kuartal kedua tahun 2015. Impor di Papua Nugini rata-rata sebesar PGK 1.579 juta dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2015. Impor tertinggi sebesar PGK 3.242 juta pada kuartal kedua tahun 2013 dan rekor terendah sejumlah PGK 518 juta pada kuartal pertama tahun 1998. Impor utama Papua Nugini berupa bahan bakar, beras, kendaraan, mesin berat, daging, besi dan baja serta ban (Trading Economics, 2016). Mitra utama impor Papua Nugini adalah Australia, Amerika Serikat, Singapura, China, Jepang Selandia Baru, Malaysia, Hongkong dan Indonesia.

Selain itu, produksi minyak mentah di Papua Nugini dari Juli 2014 – April 2015 mengalami peningkatan (lihat tabel 4). Produksi minyak mentah di Papua Nugini meningkat menjadi 52 BBL/D/1K pada Juni dari 51 BBL/D/1K pada bulan Mei 2015. Pada tabel 4. menunjukkan kuartal pertama bulan Oktober 2014, produksi minyak mentah Papua Nugini sebesar 42 BBL/D/1K dan meningkat pada kuartal kedua dan ketiga sebesar 47 BBL/D/1K. Kemudian, pada bulan April 2015, juga mengalami peningkatan dari kuartal pertama, kedua, dan ketiga sebesar 50, 51, dan 52 BBL/D/1K. Rata-rata produksi minyak mentah di Papua Nugini sebesar 57,32 BBL/D/1K dari 1994 hingga 2015. Pada bulan Juni 1997, produksi minyak mentah tersebut mencapai titik tertinggi dengan jumlah 115,42 BBL/D/1K dan rekor titik terendah dicapai pada bulan Maret 2005 sebesar 3,70 BBL/D/1K (Trading Economics, 2016).

Tabel 4. Grafik Produksi Minyak Mentah di Papua Nugini dari Juli 2014 – April 2015 (dalam barel)



Sumber: www.tradingeconomics.com, data bersumber dari U.S. Energy Information Administration

Tercatat lebih dari 90% komoditas ekspor yang dilakukan oleh Papua Nugini. Komoditas ekspor utama Papua Nugini meliputi emas, minyak, kakao, kopi, ikan, dan tembaga (lihat tabel 1). Komoditas-komoditas tersebut di ekspor ke negara-negara yang menjadi mitra ekspor utama Papua Nugini seperti negara Australia, Jepang, Belanda, Jerman, China, Korea Selatan, Filipina, Spanyol, Inggris dan Amerika Serikat (Trading Economics, 2016).

3. Innovation and Business Partnerships

Papua Nugini memiliki potensi dinamis dalam hal inovasi. Menurut Bank Dunia, hampir setengah dari populasi penduduk di Papua Nugini di bawah usia 20 tahun. Tingkat teknologi adopsi juga tinggi – dengan penggunaan ponsel meningkat di Papua Nugini. Program bantuan Australia dalam sektor ini adalah untuk mencari dan memanfaatkan peluang baru, seperti yang telah disajikan dan

memunculkan teknologi, untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di Papua Nugini. Sektor ini secara aktif melakukan keterlibatan dengan mitra-mitra dan pemikir kreatif melalui dialog dan pertukaran regular.

Program pertama dalam sektor ini ialah *Kumul GameChangers Initiative*. UNDP *GameChangers Initiative* bertujuan untuk melepaskan solusi kreatif yang dipimpin sektor swasta ke dalam tantangan pembangunan Papua Nugini. Dalam program ini, peserta yang terlibat harus menunjukkan solusi inovatif untuk masalah lingkungan atau pun sosial. Peserta juga mendapatkan pelatihan intensif dan mentoring dari program ini. Inisiatif dari program ini juga mencakup beberapa sektor seperti: gender, pertanian, perikanan, inklusi finansial, energi terbarukan, kesehatan, air dan sanitasi, dan juga pendidikan (Australian High Commission, 2016).

Selanjutnya terdapat program PNG *Bilum Pilot Project* (ITC), proyek ini bertujuan untuk memenuhi kualitas dan standar segmen pasar yang berbeda termasuk pasar internasional, sehingga secara ekonomis dapat memberdayakan perempuan di Papua Nugini. Proyek ini juga sedang menjajaki peluang bagi perempuan di Papua Nugini untuk melakukan ekspor tas bilum ke pasar internasional. Sebuah survei yang dilakukan oleh *Internasional Trade Centre* menunjukkan bahwa hingga 85% wanita yang berpartisipasi tidak memiliki dasar keterampilan membaca dan menghitung. Survei tersebut juga mengidentifikasi bahwa wanita akan mampu mencapai harga lebih tinggi untuk produk yang mereka buat di pasar internasional daripada menjual ke pasar domestik.

4. Financial Inclusion

The Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa lebih dari 80% populasi penduduk Papua Nugini tidak melek finansial. Hal ini juga memperkirakan bahwa kurang dari 10-15% populasi penduduk Papua Nugini yang memiliki akses ke layanan keuangan. Namun, sektor keuangan mikro di Papua Nugini memiliki potensi untuk membuka peluang bagi pengusaha dan juga mendukung pendidikan dan kesehatan di tingkat keluarga. Pada sektor ini,

bantuan Australia akan fokus dalam membawa bagian termiskin populasi di Papua Nugini (terutama wanita) ke dalam *cash economy* melalui peningkatan dukungan untuk inklusi keuangan dan melek finansial.

Microfinance Expansion Project (MEP) merupakan program yang bertujuan untuk mendidik 120.000 orang dengan pelatihan melek finansial. Pada bulan Maret 2015, lebih dari 39.600 orang telah lulus dari tahap pertama pelatihan, 7.000 di antaranya membuka rekening tabungan baru (Australian High Commission, 2016). MEP ini mendukung masyarakat pedesaan untuk mengakses tabungan dan layanan kredit.

Program kedua yang dibuat adalah *Mobile Banking service support* atau dukungan layanan *Mobile Banking*. *International Finance Corporation* (IFC) mendukung peluncuran layanan *mobile banking* melalui lembaga perbankan besar yang ada termasuk *Bank of South Pacific* (BSP) dan ANZ. Proyek percontohan *mobile banking* dimulai pada tahun 2012 bekerjasama dengan BSP, pada saat itu terdaftar 150.000 pelanggan yang tak memiliki rekening bank – 33% di antaranya adalah wanita. Kemudian, IFC bermitra dengan ANZ untuk mendukung peluncuran layanan *mobile banking* nya. Hal ini diharapkan akan mencapai target baik dalam penggunaan *mobile banking* di Papua Nugini.

Kerugian Papua Nugini Menerima dan Melaksanakan Kebijakan PNG Solution

Konsekuensi negatif yang di dapat Papua Nugini jika menerima dan melaksanakan Kebijakan *PNGSolution* yang ditawarkan oleh Australia adalah Papua Nugini akan dihadapkan pada situasi yang sulit karena akan menghadapi banyak tekanan dan cemoohan yang datang dari berbagai pihak jika menerima dan melaksanakan Kebijakan *PNG Solution* ini. Pihak-pihak yang kontra terhadap isi dari kebijakan ini datang dari kalangan domestik seperti masyarakat Papua Nugini sendiri yang tidak setuju dengan kebijakan ini dan beberapa akademisi yang berasal dari beberapa universitas di Australia yang mewaspadaai tindakan Papua Nugini dan Australia yang nantinya justru akan melanggar beberapa poin dalam hukum internasional di bidang pengungsi.

Selain itu, pihak-pihak lain seperti Amnesty Internasional dan UNHCR yang menilai bahwa pusat penampungan pencari suaka di Papua Nugini masih jauh dari kata layak pakai. Hal ini terlihat ketika kunjungan ke Papua Nugini, UNHCR menyimpulkan ada kekurangan yang signifikan dalam kerangka hukum untuk menerima dan memproses pencari suaka dari Australia. ini termasuk kurangnya kapasitas nasional dan keahlian dalam memproses, dan kondisi fisik yang buruk dalam pengaturan penahanan di Papua Nugini. Hal ini bisa berbahaya bagi kesejahteraan fisik dan kejiwaan para pencari suaka, terutama keluarga dan anak-anak (UNHCR, 2013).

Kendala lain yang akan dihadapi oleh Papua Nugini ialah tujuh poin keberatan (*seven reservations*) yang diajukan Papua Nugini saat awal menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 & Protokol 1967 pada 17 Juli 1986. Menurut Artikel 42(1) dalam *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees* dapat mengajukan poin keberatan (*reservation*) yang artinya negara tersebut tidak wajib untuk mematuhi artikel-artikel yang diajukan dalam upaya perlindungan pengungsi. Papua Nugini membuat tujuh poin keberatan yang terdiri dari keberatan terhadap *wage-earning employment, housing, public education, freedom of movement, refugees unlawfully in the country of refugee, expulsion, dan naturalization*. hal ini menunjukkan bahwa Papua Nugini dalam pelaksanaan *PNG Solution*, tentu harus menarik kembali poin keberatan yang sebelumnya Pemerintah Papua Nugini ajukan karena poin *resettlement* dalam Kebijakan *PNG Solution* sangat kontradiksi terhadap seluruh poin keberatan yang sebelumnya sudah diajukan oleh Pemerintah Papua Nugini.

PENUTUP

Pada masa pemerintahan PM Kevin Rudd, Australia menjalin kerjasama bilateral dengan Papua Nugini. Kerjasama bilateral antara Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Australia yang dimaksud yaitu *Regional Resettlement Arrangement (RRA)* yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Papua New Guinea Solution (*PNG Solution*). Kerjasama bilateral ini dilakukan pada masa pemerintahan PM Peter O'Neill dari Papua Nugini dan PM Kevin Rudd dari

Australia. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan cara membawa para pencari suaka yang tiba di Australia ke wilayah Papua Nugini untuk dilakukan pemindahan dan pemrosesan di bawah hukum Papua Nugini.

Referensi

Australian High Commission. (2015). Dipetik Maret 16, 2016, dari http://png.embassy.gov.au/files/pmsb/PMD15%2043991%20%20G2253_FACT%20SHEET_PILLAR%201_WEB.pdf

Australian High Commission. (2015). Dipetik Maret 16, 2016, dari http://png.embassy.gov.au/files/pmsb/PMD15%2043992%20%20G2253_FACT%20SHEET_PILLAR%202_WEB.pdf

Australian High Commission. (2016). Dipetik Maret 16, 2016, dari http://png.embassy.gov.au/files/pmsb/PMD15%2043993%20%20G2253_FACT%20SHEET_PILLAR%203_WEB.pdf

Australian High Commission. (2016). Dipetik Maret 16, 2016, dari http://png.embassy.gov.au/files/pmsb/PMD15%2043994%20%20G2253_FACT%20SHEET_PILLAR%204_WEB.pdf

DFAT. (t.thn.). Dipetik Maret 16, 2016, dari <http://dfat.gov.au/geo/papua-new-guinea/development-assistance/Pages/enabling-economic-growth-png.aspx>

Trading Economics. (2016). Dipetik Maret 16, 2016, dari <http://www.tradingeconomics.com/papua-new-guinea/exports>

Trading Economics. (2016, Maret). Dipetik Maret 19, 2016, dari <http://cdn.tradingeconomics.com/charts/papua-new-guinea-crude-oil-production.png?s=papuanewcruoilpro&v=201602111159n>

Trading Economics. (2016). Dipetik March 30, 2016, dari <http://www.tradingeconomics.com/papua-new-guinea/imports>

UNHCR. (2013). Dipetik Maret 17, 2016, dari <http://www.unhcr.org/51f2560d9.html>

UNICEF. (2013). Dipetik Maret 19, 2016, dari http://www.unicef.org/png/activities_4373.html